



## **BAB IV**

# **TUGAS PEMBANTUAN**

### **A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomer 47, Tambahan Lembaran Negara Nomer 42286);
- b. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4578);



- e. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomer 20, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4816).

#### **A.1. Bidang Kesehatan**

##### **1) Dasar Hukum**

- Permenkes No 84 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014
- Permenkes Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Penggunaan Dana (Dak) Tahun Anggaran 2017

##### **2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Tugas Pemberian Dana APBN Tahun Anggaran 2017 Berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

##### **3) Program Dan Kegiatan**

- DAK Fisik Membantu mendanai kegiatan fisik bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Program Kegiatan Yaitu :
  - a. DAK Pelayanan Dasar
  - b. DAK Pelayanan Farmasi
- DAK Non Fisik mendanai kegiatan Non fisik bidang kesehatan  
 Terdiri atas :
  - a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
  - b. Jaminan Persalinan (Jampersal)
  - c. Akreditasi Puskesmas

##### **4) Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan**

- DAK 2016 bidang Pelayanan Dasar 95%
- DAK 2016 bidang Pelayanan Farmasi 91%
- DAK Non Fisik 2016 BOK 34%
- DAK Non Fisik 2016 Jampersal 2%



- DAK Non Fisik 2016 Akreditasi Puskesmas 40%

5) Sumber Dana Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 Bersumber Dari Kementerian Kesehatan RI Berupa Kegiatan Fisik Dan Non Fisik Terdiri :

- DAK 2016 bidang Pelayanan Dasar 14.576.012.050,-
- DAK 2016 bidang Pelayanan Farmasi 5.611.664.427,-
- DAK Non Fisik 2016 BOK 1.261.536.250,-
- DAK Non Fisik 2016 Jampersal 17.581.000,-
- DAK Non Fisik 2016 Akreditasi Puskesmas 105.759.103,-

6) Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu DAK Fisik pada bidang Pelayanan Farmasi dan Pebejalan Kesehatan (YANFAR PERBEKKES) dan DAK Non Fisik pada Bidang Pelayanan Medik (YANMED)

7) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Terlampir Pada Lampiran III.F.1

8) Permasalahan Dan Solusi

- DAK 2016 bidang Pelayanan Dasar

Pengadaan Alkes dengan proses E-Katalog dan tender, dananya mengalami keterlambatan sehingga memperngaruhi proses pencairan Alkes. Pencairan pada akhir tahun tanggal 30 Desember 2016, batas proses pencairan ahir tahun tutup buku pada kas daerah tanggal 29 Desember 2016 Sehingga kegiatan tersebut beralih ke tahun 2017 sebagai DAK Tambahan/Lanjutan

Solusinya : Proses Pencairan kegiatan dipercepat sebelum akhir tahun, sehingga pelaksanaan program kegiatan mencapai 100%

- DAK 2016 bidang Pelayanan Farmasi

Tidak tersedianya obat yang dibutuhkan pada penyedia E-Catalog, sehingga mengalami kekurangan obat yang dibutuhkan dan masalah jaringan aplikasi pada LPSE

Selusnya :Pemesanan Obat sebaiknya dilakukan pada awal tahun

- DAK Non Fisik 2016 BOK



- a. Koordinasi kurang berjalan antara PPTK, Bendahara dengan PPKAD tentang proses pencairan dana BOK sehingga sehingga mempengaruhi capaian realisasi keuangan Dana BOK
- b. LPJ dari FKTP ke dinkes tidak tepat waktu sesuai dengan kesepakatan sesuai tanggal 5 bulan berjalan sehingga pencairan dana BOK terlambat.
- DAK Non Fisik 2016 Jampersal
  - a. Jukni Jampersal yang belum baku
  - b. Ibu hamil yang mendapatkan di RTK adalah ibu hamil yang berdomisili sulit, sedangkan kita ketahui secara geografis hanya beberapa FKTP yang masuk kategori tersebut (Akses Sulit) atau FKTP yang mempunyai wilayah kepulauan
- DAK Non Fisik 2016 Akreditasi Puskesmas  
 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas transfer dana dari pusat ke kabupaten Penerima yaitu PPKAD dalam bentuk kegiatan yaitu dana DAK Non Fisik dimana tergabung di dalamnya BOK, Jampersal dan Akreditasi Puskesmas sementara kegiatan akreditasi pada triwulan III dan IV, sehingga pada saat semua Program kegiatan DAK Non Fisik ikut terpengaruhi

## **A.2. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura**

- Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan
- 1) Dasar Hukum :
  1. DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.199125/2016 TANGGAL 7 Desember 2015, Revisi ke 01 Tanggal 23 Februari 2016
  2. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 820/289/DISTPH tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pertanian Kabupaten Kota yang Membidangi Tanaman Pangan



Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016, tanggal 20 Januari 2016.

- 2) Instansi Pemberi Tugas : Direktorat Jenderal Tanaman Pangan SKPD yang
- 3) Melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 4) Realisasi Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya :

*Realisasi Program/ Kegiatan*

1. Gerakan Tanam Padi Teknologi Jajar Legowo 1000 Ha
  2. Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida 1000 Ha
  3. Bantuan Benih Jagung Hibrida Lahan Khusus (APBNP) Kerjasama Polres 235 Ha
- 5) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran :  
 Sumber dana : APBN  
 Jumlah Dana : Rp. 4.073.810.000,- (Empat milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
  - 6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Terlampir Pada Lampiran III.F.1
  - 7) Permasalahan dan Solusi :  
 Adanya penghematan anggaran pada akun

**A.3. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air (PLA)**

- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

1) Dasar Hukum :

- a. DIPA Nomor : 018.08.4.199133/2016 tanggal 7 Desember 2015
- b. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 Nomor : 820/286/DISTPH tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dinas Pertanian Kabupaten Kota yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016, tanggal 20 Januari 2016.

- 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.



- 3) SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 4) Program dan Kegiatan
  - 1) *Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian*
    - ✓ Pengembangan irigasi perpipaan/ irigasi perpompaan
    - ✓ Pengembangan embung pertanian
  - 2) *Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian*
    - ✓ Cetak sawah
  - 3) *Pengelolaan Sistem Peyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian*
    - ✓ Bantuan traktor roda dua
    - ✓ Bantuan Pompa air
  - 4) *Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian*
    - ✓ Layanan perkantoran
  - 5) *Fasilitasi Pupuk dan Pestisida*
    - ✓ Pendampingan verifikasi dan validasi
    - ✓ Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- 5) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
  1. *Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian*
    - ✓ Pengembangan irigasi perpipaan/ irigasi perpompaan 26 unit
      - Poktan Bonto Harapan Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur 1 unit
      - Poktan Binanga La'ba Desa Labuang Pamajang Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
      - Poktan Pinang Jaya Desa Labuang Pamajang Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
      - Poktan Lembang – Lembang Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
      - Poktan Mekar Sari Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
      - Poktan Suka Maju Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu 1 unit



- P3A Je'ne Mata Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur 1 unit
  - Poktan Bonto Kalimbu Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
  - Poktan Kampung Bugis Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
  - Gapoktan Rahmat Ilahi Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
  - P3A Binanga Nipa Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
  - Gapoktan Hamparan Hijua Desa Teluk Kampe Kec. Pasimasunggu 1 unit
  - Gapoktan Bina Bersama Desa Ujung Kec. Pasimasunggu Timur 1 unit
  - Poktan Tunas Harapan Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu 1 unit
  - Poktan Labuang Marege Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu 1 unit
  - Poktan Bina Bersama Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu 1 unit
  - Poktan Maju Bersatu Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu 1 unit
  - Poktan Baji Pa'mai Desa Ma'minasa Kec. Pasimasunggu 1 unit
  - Poktan Fajar Fitrah Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai 1 unit
  - Poktan Lembang Lohe Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai 1 unit
  - Poktan Mekar Jaya Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu 1 unit
  - Poktan Tunas Jati Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu 1 unit
  - Poktan Turikale Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu 1 unit
  - ✓ Pengembangan embung pertanian 3 unit
  - P3A Je'ne Mata Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur 1 unit
  - P3A Bontomanai Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur 1 unit
  - Poktan Minasa Makmur Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
2. *Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian*
- ✓ Cetak sawah 248,67 Ha



- Poktan Lembang Lohe Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai 5,89 Ha
  - Poktan Turikale Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu 1,58 Ha
  - Gapoktan Hamparan Hijau Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu 2,54 Ha
  - Poktan Baji Pa'mai Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 3,09 Ha
  - Poktan Mekar Sari Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 5,18 Ha
  - Poktan Tunas Harapan Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 12,35 Ha
  - Poktan Labuang Marege Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 5,77 Ha
  - Poktan Bina Bersama Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 7,83 Ha
  - Poktan Maju Bersatu Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 4,08 Ha
  - Poktan Fajar Fitrah Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai 3,21 Ha
3. *Pengelolaan Sistem Peyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian*
- ✓ Bantuan traktor roda dua (R2) 11 unit
    - Poktan Lembang Lohe Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai 1 unit
    - Poktan Turikale Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu 1 unit
    - Gapoktan Hamparan Hijau Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
    - Poktan Baji Pa'mai Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
    - Poktan Mekar Sari Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
    - Poktan Tunas Harapan Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 1 unit





- Poktan Labuang Marege Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
- Poktan Bina Bersama Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
- Poktan Maju Bersatu Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu 1 unit
- Poktan Fajar Fitrah Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai 1 unit
- Poktan Topuriti Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai 1 unit
- ✓ Bantuan Pompa air 2 unit
- Poktan Lembang Lohe Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai 1 unit
- Poktan Fajar Fitrah Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai 1 unit

4. *Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian*

- ✓ Layanan perkantoran
- 5. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
- ✓ Pendampingan verifikasi dan validasi
- ✓ Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)

6) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran :

Sumber dana : APBN

Jumlah Dana : Rp. 7.766.510.000,- (Tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

7) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Terlampir Pada Lampiran III.F.1

8) Permasalahan dan Solusi :

- a. Pelaksanaan fisik kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan/ Perpompaan dan Pengembangan Embung Pertanian telah mencapai 100% tetapi jumlah dana yang terealisasi baru mencapai 70% karena adanya pemotongan anggaran dari Kementerian Pertanian. Untuk sisa anggaran 30% akan diluncurkan ke tahun 2017.



- b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian : kurangnya ketersediaan alat dan mesin pertanian.
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian : bantuan alat dan mesin pertanian masih kurang sehingga menghambat kinerja kelompok tani penerima cetak sawah baru.

#### **A.4. Bidang Kehutanan**

- Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

##### 1) Dasar Hukum :

DIPA Nomor : SP DIPA-029.04.2.427061/2015 TANGGAL 7 Desember 2015

##### 2) Instansi Pemberi Tugas : Balai Pengelolaan Saerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang

##### 3) SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar

##### 4) Realisasi Program, Kegiatan dan Pelaksanaannya :

##### *Realisasi Program/ Kegiatan*

1. Pemeliharaan Hutan Kota Tahun I
2. Pemeliharaan Hutan Kota Tahun II

##### 5) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran :

- Sumber dana : APBN
- Jumlah Dana : Rp. 57.752.000,- (Lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

##### 6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Terlampir Pada Lampiran III.F.1

##### 7) Permasalahan dan Solusi : -

#### **A.5. Bidang Kependudukan**

##### 1) Dasar Hukum



- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2015 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementrian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;
  - Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-010.08.4.191440/2016.
- 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan  
 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
  - 3) Program dan Kegiatan
    - Program Penataan Administrasi Kependudukan;
    - Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu.
  - 4) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan  
 Rp. 981.313.500,-.
  - 5) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
    - Sumber Dana : APBN TA. 2016 (Rupiah Murni) Rp. 686.048.000,-.
  - 6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - 7) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan  
 Terlampir pada lampiran III.F.1
  - 8) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)  
 Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan kurang mencukupi untuk mendukung kelancaran pelayanan Administrasi Kependudukan secara optimal, antara lain berupa kondisi gedung kantor yang kurang memadai, tidak ada kendaraan operasional untuk pelayanan keliling dan



sarana pendukung lainnya seperti jaringan komunikasi data (VSAT mobile), komputer PC dan Laptop.

9) Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

- ✓ Terbatasnya jumlah personil PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- ✓ Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan khususnya Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
- ✓ Masih kurangnya sinergi antara desa/kelurahan, kecamatan, dan SKPD terkait lainnya dengan Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil dalam meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sebagai bentuk perlindungan terhadap penduduk atas hak untuk memperoleh identitas dan hak-hak sipil lainnya;
- ✓ Masih terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia melalui Dana Tugas Pembantuan dan APBN untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan secara lebih optimal sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi wilayah geografis Kabupaten Kepulauan Selayar;
- ✓ Kondisi gedung kantor yang tidak refresentatif sebagai sebuah tempat pelayanan publik yang seharusnya memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan misalnya ruang tunggu yang tidak memadai, *layout* ruangan yang tidak sesuai dengan alur pelayanan, kurangnya alat pendingin udara, dll yang berpengaruh kepada rendahnya kualitas pelayanan.

- Solusi

- ✓ Penambahan jumlah personil PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan;
- ✓ Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan secara terus menerus kepada masyarakat;



- ✓ Meningkatkan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama desa/kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait dengan difasilitasi oleh Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- ✓ Penyusunan rencana anggaran Dana Tugas Pembantuan yang bersumber dari APBN agar dilakukan secara bottom up dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sehingga anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil;
- ✓ Rehabilitasi/pembangunan gedung kantor yang didesain sebagai sebuah fasilitas pelayanan publik yang baik dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

#### **A.6. Bidang Ketahanan Pangan**

##### **1) Dasar Hukum :**

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2016 Satker Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 018-11.3.199374/2016 Tanggal 29 Februari 2016(Revisi Pertama) dan DIPA nomor : 018-11.3. 199374/2016 tanggal 1 Juli 2016 (Revisi Kedua).
- Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016,
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 900/24/BKPD, Tentang Penunjukan Petugas Pengelola Anggaran dan Penetapan Besarnya Honor Terkait Dengan Operasional Kegiatan APBN (Dana Dekonsentrasi) Kementerian Pertanian (Tingkat Kabupaten/Kota) Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016, Tanggal 4 Februari 2016.

##### **2) Instansi Pemberi Kegiatan Dana Dekonsentrasi : Badan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.**



3) SKPD yang Melaksanakan Kegiatan Dana Dekonsentrasi : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar.

4) Program Kegiatan dan Pelaksanaannya :

- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan:

**Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar:**

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

- Jumlah desa yang diberdayakan melalui pendampingan pengembangan kawasan rumah pangan lestari pada tahun 2015 sebanyak 6 desa dan tahun 2016 adalah tahap pengembangan sebanyak 6 desa atau terealisasi 100%. Perkembangan jumlah desa yang diberdayakan melalui kegiatan dana dekonsentrasi sejak tahun 2012 sampai 2016 nampak pada tabel berikut;

**Tabel 4.1.**

**Perkembangan Jumlah Kelompok P2KP Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2012 -2016**

NO	KEC. DESA KELURAHAN	OPTIMALISASI LAHAN PEKARANGAN/KR PL		P2KP PADA KEBUN SEKOLAH	PENYULUH PENDAMPING	KET
		NAMA KELOMPOK	JUMLAH ANGG.	NAMA SEKOLAH		
1	<b>BONTOMATE NE</b>					
	<b>TAHUN 2012</b>					
	Barat Lambongan	Teratai	28		Muh. Sadli, A.Md	
	Maharayya	Anggrek IV	20		Hamzah Raja, SP	
	<b>TAHUN 2013</b>					
	Tamalarea	Anggrek	30	SDN Barangka	Rezki Wiradah	
	Onto	Joro Bodo Mandiri	30	SMPN 2 Bontomatene	Suwardi Lakoro	
	<b>TAHUN 2014</b>					
	Tanete	Langsogai	30	SD Parangia	Dehang, S.ST	



		ya			
	Tahun 2015-2016	Makmur	15		Sawarti
2	<b>BUKI</b>				
	<b>TAHUN 2012</b>				
	Buki	Melati I	17		Cayana, S.ST
	Kohala	Mekar	20		Andi Usral
	<b>TAHUN 2013</b>				
	Lalang Bata	Sejahtera	30	MTSN 2 Bontomatene	Datulangi, S.ST
	<b>TAHUN 2014</b>				
3	Bontolempangan	Mawar	30	SDN Tanabau	Abd. Hakim
	<b>BONTOMANAI</b>				
	<b>TAHUN 2012</b>				
	Polebungin	Anggrek I	18		Nur. Abidin
	Parak	Matahari	20		A. Husni Tabe, S.ST
	<b>TAHUN 2013</b>				
	Bonea Timur	Mawar	30	MTS Lembang Bau	Nur Aeda
	<b>TAHUN 2014</b>				
	Bontomarannu	Flamboyan	30	SD Bontomarannu	Mei sudarjo, SP.,MP
	Jambuiya	Makmur	30	SD LB. Matene	Suriani, A.Md
	<b>Tahun 2015-2016</b>				
4	- Mare-mare	Mawar	15		Nasrianti, SP.
	- Bonea Timur	Melati	15		Nur Aeda
	<b>BENTENG</b>				
	<b>TAHUN 2013</b>				
	Benteng Utara	Kembang Melati	30	SMKN 1 Benteng	Umi Azimar, SP
5	<b>TAHUN 2014</b>				
	Benteng Selatan	Lorong Bambu	30	SMK	Abd. Haliq, SP
	<b>BONTOHARU</b>				
	<b>TAHUN 2012</b>				
	Kalepadang	Kartini	21		Herlina
	Bontotangga	Kamboja	20		Rahmi Apriati, SP
6	<b>TAHUN 2013</b>				
	Putabangun	Seruni	30	SDN Tabang	St. Nurlaela, DS
	<b>BONTOSIKUYU</b>				
	<b>TAHUN 2012</b>				



	Harapan	Matahari	23		Hasmiati, A.Md
	Laiyolo	Mawar	20		Normawati
	<b>TAHUN 2014</b>				
	Patilereng	Tunas Harapan	30	SD Reaiya	Nur Syamsi, A.Md
	<b>Tahun 2015-2016</b>				
	- Laiyolo	Matahari	15		Normawati
	- Bin. Sombayya	Binanga Jaya	15		Andi Nurlia
	- Laiyolo Baru	Melati	15		Mardati A. SP.
<b>7</b>	<b>PASIMASUNG GU</b>				
	<b>TAHUN 2013</b>				
	Masungke	Kuncup Mekar	30	SD Inpres Dodak	Syahrul
<b>8</b>	<b>TAKA BONERATE</b>				
	<b>TAHUN 2013</b>				
	Kayuadi	Mentari	30	SD Inpres Kayuadi	Andi Mutiara

Kelompok Penerima Manfaat tahun 2012, terdiri dari kelompok optimalisasi lahan pekarangan dan kelompok pengolahan tepung-tepungan masing-masing 10 kelompok, mendapat bansos dengan pemanfaatannya untuk :

- Pengembangan Demplot Pekarangan Kelompok & anggota sebesar Rp 16.000.000,-.
- Pengembangan pengolahan tepung-tepungan sebesar Rp 8.500.000,-.

Kelompok Penerima Manfaat tahun 2013, mendapat bansos Rp 47.000.000,-, dengan pemanfaatannya untuk :

- 1) Pengembangan Demplot Pekarangan Kelompok & anggota sebesar Rp 30.000.000,-.
- 2) Pengembangan Kebun Bibit sebesar Rp 12.000.000,-.
- 3) Pengembangan Kebun Sekolah sebesar Rp 3.000.000,-.
- 4) Pengembangan Menu B2SA sebesar Rp 2.000.000,-.

Kelompok Penerima Manfaat tahun 2013 (lanjutan), mendapat bansos





Rp 3.000.000,-, dengan pemanfaatannya untuk Kebun Bibit.

Kelompok Penerima Manfaat tahun 2014, mendapat bansos Rp 47.000.000,-, dengan pemanfaatannya untuk :

- 1) Pengembangan Demplot Pekarangan Kelompok & anggota sebesar Rp 30.000.000,-.
- 2) Pengembangan Kebun Bibit sebesar Rp 12.000.000,-.
- 3) Pengembangan Kebun Sekolah sebesar Rp 3.000.000,-.

Kelompok Penerima Manfaat tahun 2015, mendapat bansos Rp 15.000.000,-, dengan pemanfaatannya untuk :

- 1) Pembuatan Kebun Bibit sebesar Rp 5.000.000,-
- 2) Pekarangan Anggota sebesar Rp 8.000.000,-.
- 3) Pembuatan Demplot sebesar Rp 2.000.000,-
- 4) Pelatihan Pendamping P2KP sebesar Rp.9.120.000,-

Kelompok Penerima Manfaat tahun 2016, mendapat bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat /Pemda Rp 10.000.000,- per kelompok, dengan pemanfaatannya untuk :

- 1) Pembuatan Kebun Bibit sebesar Rp 2.000.000,-
- 2) Pekarangan Anggota sebesar Rp 6.000.000,-.
- 3) Pembuatan Demplot sebesar Rp 2.000.000,-.
- 4) Pelatihan Pendamping P2KP sebesar Rp. 11.460.000,-
- 5) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran : Rp.155.660.000
  - Sumber Dana : Dekonsentrasi (APBN)
  - Jumlah Dana : Rp. 127.160.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan  
 Indikator Kinerja Kegiatan :

- Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Ketahanan Pangan (1 Dokumen) terealisasi 100%.

Sumber Dana dan Jumlah Anggaran

- Sumber Dana : Dekonsentrasi (APBN)
- Jumlah Dana : Rp.28.500.000,-

Pelaksanaan Program: Januari – Desember 2016



Total Dana Dekonsentrasi : Rp.155.660.000,-

Terealisasi: Rp.155.660.000,- (100%)

6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Terlampir  
 Pada Lampiran III.F.1

7) Permasalahan dan Solusi :

Tidak ada permasalahan/kendala berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan terlihat dari realisasi fisik dan keuangan kegiatan mencapai 100% pada Tahun Anggaran 2016.

#### **A.7. Bidang Kelembagaan Petani /Penyuluh dan Penyelenggaraan Penyuluhan**

1) Dasar Hukum :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 Nomor : DIPA-018.10.199375/2016 Tanggal 19 Februari 2016 Satuan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Sulawesi Selatan (1999375)
  - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016,
  - SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 910/3196/SK/II/2016 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf Pengelola Keuangan di Kabupaten Selayar pada Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian pada Satuan Kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 Tanggal 15 Februari 2016
  - SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 910/058/SK/II/2016 tentang Penunjukan Operator Simlul dan Administratur Cyber Extension di Kabupaten Kepulauan Selayar pada satuan kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Sulawesi Selatan (1999375) Tahun Anggaran 2016 Tanggal 24 Februari 2016
- 2) Instansi Pemberi Kegiatan dana Dekonsentrasi : Badan Koordinasi Penyuluhan Propinsi Sulawesi Selatan.



3) SKPD yang Melaksanakan Kegiatan Dana Dekonsentrasi : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Kepulauan Selayar.

4) Program Kegiatan dan Pelaksanaannya :

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani  
 Kegiatan:

#### **1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**

- Kelembagaan Penyuluh Pertanian yang di Fasilitas: 1 unit  
 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten
  - a. Temu teknis tingkat kabupaten/Kota.
  - b. Pengembangan data base penyuluhan tingkat kabupaten/Kota
  - c. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
  - d. Administrasi Kegiatan
  - e. Pembinaan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
- Materi Penyuluhan Tk Provinsi
  - a. Pengembangan Materi Penyuluhan melalui langganan tabloit pertanian.
  - b. Langganan Majalah materi pertanian bagi kelembagaan provinsi.
 Pelaksanaannya : Januari – Desember 2016

5) Sumber Dana dan Jumlah Anggaran :

Sumber Dana : Dekonsentrasi (APBN)

Jumlah Dana : Rp. 375.753.500,-

Terealisasi : Rp. 375.753.500, - (100%)

6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan  
 Terlampir Pada Lampiran III.F.1

7) Permasalahan dan Solusi :

Selama pelaksanaan program dan kegiatan berlangsung tidak ditemukan permasalahan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari Realisasi Fisik dan Keuangan yang mencapai 100.00%.

#### **A.8. Bidang Kelautan Dan Perikanan, Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil**

1) Dasar Hukum

- DIPA Nomor : DIPA-032.07.4.199503/2015 tanggal 07 Juli 2015



- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.86/MEN/KU.611/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Kleuatan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2015, tanggal 15 April 2015.
- 2) Instansi Pemberi Tugas Pemberian  
Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 3) SKPD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 4) Kegiatan
  - Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis;
  - Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha.
- 5) Sumber Dana APBN TP
  - PHLN, Jumlah anggaran : Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar);
  - Rupiah murni, jumlah anggaran Rp. 1.022.000.000,- (satu miliar dua puluh dua juta rupiah).
- 6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan  
Terlampir Pada Lampiran III.F.1
- 7) Masalah -